



Dinamika Pendidikan Islam Pasca Kemerdekaan Indonesia: Antara Kebijakan, Transformasi Institusi, dan Peran Tokoh Pembaru

^{1*}Sakti Putra Mahardika; ²Dzul kifli Hadi Imawan; ³Sri Haningsih

¹⁻³Universitas Islam Indonesia Yogyakarta Indonesia

¹saktiputramahardika1@gmail.com; ²dzulkifli.hadi.imawan@uii.ac.id;

³srihaningsih@uii.ac.id

* Penulis Koresponden

Diajukan: 03-12-2025

Diterima: 14-01-2026

ABSTRACT: The Islamic education in Indonesia have been surpassed many improvement phases. This research would present systematic the imagine of Indonesia Islamic education in policies, institution, and figure contributions. In this study, qualitative methods that based on literature review with analysis content are combined. The Old Order era was marked by the stabilization, adaptation, and transition of the non-classical to classical system of Islamic education. During the New Order era, the government recognized madrasahs as formal institutions equal to other Islamic higher education initiatives. The Reformation era saw modernization efforts in madrasahs, Islamic boarding schools, and Islamic universities. In addition to strengthening Islamic education through new laws, progress was inextricably linked to the contributions of educational figures from the ranks of ulama, intellectuals, and bureaucrats. The conclusion suggests that synergy between policy and leadership is key to the transformation of Islamic education in Indonesia from independence to the reform era.

KEYWORDS: Islamic education, policies, institution, figures, Indonesia

ABSTRAK: Dinamika pendidikan Islam di Indonesia telah melewati fase-fase penyempurnaan. Penelitian ini fokus dalam penyajian gambaran sinergitas dinamika perkembangan kebijakan, lembaga, dan para tokoh pembaharu pendidikan Islam. Metode penelitian kualitatif berbasis studi pustaka dan teknik analisis konten. Era Orde Lama diwarnai dengan stabilisasi, adaptasi, dan transisi sistem non klasikal menjadi klasikal pendidikan Islam. Pada Era Orde Baru, pemerintah mengakui madrasah sebagai institusi formal yang setara dengan lainnya selain inisiasi pendidikan tinggi Islam. Era Reformasi muncul usaha modernisasi pada madrasah, pesantren, maupun perguruan tinggi Islam. Selain penguatan pendidikan Islam lewat undang-undang baru. Kemajuannya tak luput dari kontribusi para tokoh pendidikan dari kalangan ulama, cendekiawan, maupun birokrat. Kesimpulan menunjukkan sinergitas antara kebijakan dan ketokohan menjadi kunci utama transformasi berkemajuan pendidikan Islam di Indonesia pasca kemerdekaan hingga reformasi.

KATA KUNCI: Pendidikan Islam, Kebijakan, Lembaga, Tokoh, Indonesia

A. PENDAHULUAN

Perkembangan pendidikan Islam di dalam negeri tidak lepas dari berbagai kelimut dinamika kebijakan pemerintah yang telah dimulai pada era awal kemerdekaan. Embrio berbagai bentuk lembaga pendidikan Islam berserta kurikulumnya yang telah eksis dan berkembang sebelum kemerdekaan. Sekejap setelah kemerdekaan tercapai, pemerintah Republik Indonesia mulai bergerak untuk menata sendi-sendi kerangka negara salah satunya sendi pendidikan. Pendidikan merupakan salah satu sendi yang menjadi tiang langgengnya suatu bangsa yang merdeka.¹ Gerak cepat untuk menata kerangka sistem pendidikan merupakan langkah konkret demi terciptanya kondisi belajar yang ideal bagi seluruh rakyat. Tidak terlepas dari pembangunan bidang pendidikan secara umum tersebut, yaitu pendidikan Islam.

Apabila direnungkan kembali, umat Islam sudah memiliki bangunan sistem pendidikan jauh sebelum kemerdekaan. Corak pembelajaran non klasikal di masjid, surau, pesantren, dan semisalnya menjadi ciri utama bentuk pengajaran pada era pra kemerdekaan.² Sesuatu yang patut dibanggakan, pesantren merupakan lembaga pendidikan Islam yang telah ada bahkan sebelum kolonialisme yang sebenarnya merupakan gubahan dari lembaga pendidikan Hindu saat Islam belum menyebar.³ Selain pesantren, pada awal abad 20, jamak mulai muncul berbagai lembaga pendidikan Islam berbentuk madrasah atau sekolah klasikal di seantero nusantara. Inisiasi ini dilatarbelakangi oleh berbagai komunitas Islam di daerah, tokoh pemikir, maupun organisasi Islam yang mulai lahir secara masif.⁴ Pendirian sekolah tinggi Islam juga tidak luput beredar di beberapa daerah. Usaha tersebut tercermin pada pendirian Sekolah Tinggi Islam

¹ Sri Nilawati, Hifza, and Andi Achruh, "Pendidikan Islam di Indonesia Pasca Kemerdekaan," *PIJAR: Jurnal Pendidikan dan Pengajaran* 2, no. 1 (December 31, 2023): 108–15, <https://doi.org/10.58540/pijar.v2i1.492>.

² Haidar Putra Daulay, *Pendidikan Islam Dalam Sistem Pendidikan Nasional* (Jakarta: Kencana Prenadamedia Grup, 2004).

³ Yuliani and Edy Purwanto, "Pendidikan Islam Di Indonesia Setelah Merdeka," *Adiba: Journal of Education* 2, no. 1 (2022): 88–96; DM Herman, "Sejarah Pesantren Di Indonesia," *Jurnal Al-Ta'dib* 6, no. 2 (2013): 145–58.

⁴ Manpan Drajat, "Sejarah Madrasah di Indonesia," *al-Afkar, Journal for Islamic Studies* 1, no. 1 (January 28, 2018): 196–206, <https://doi.org/10.5281/ZENODO.1161729>.

Persatuan Guru-guru Agama Islam di Padang,⁵ dan Sekolah Tinggi Islam (STI) lewat gagasan Masyumi di Jakarta.⁶ Seluruh pembentukan sistem pendidikan Islam yang rapi dan terus berkembang ini tidak lepas dari kerja keras dari komunitas muslim, ketokohan, maupun organisasi keumatan.⁷

Hasil dari jerih payah perjuangan umat Islam tersebut pun mendapat perhatian dari pemerintah setelah kemerdekaan diraih. Langkah konkret pada awal masa kemerdekaan diwujudkan dalam pemberian bantuan materi dan rencana pengintegrasian kurikulum agama di sekolah negeri.^{8,9} Tindakan ini diprakarsai oleh beberapa kementerian diantaranya kerjasama Kementerian Pendidikan, Budaya dan Kementerian Agama, dan Kementerian dalam Negeri.¹⁰ Setelah menginjak era Orde Baru orientasi pendidikan mulai ditata untuk siap menghadapi tantangan global dalam berbagai ranah kehidupan. Era ini juga diisi dengan penerbitan sistem pendidikan yang terintegrasi secara nasional dan pengakuan madrasah sebagai lembaga pendidikan formal setara dengan sekolah negeri.¹¹ Era Reformasi pada kelanjutannya berhasil membuat penyempurnaan sistem pendidikan nasional, pembukuan resmi lembaga-lembaga pendidikan Islam lewat naungan undang-undang, modernisasi dunia pendidikan,

⁵ Mahmud Yunus, *Sejarah Pendidikan Islam Di Indonesia* (Jakarta: Mahmud Yunus Wadzuriyyah, 2008).

⁶ Universitas Islam Indonesia, *Setengah Abad UII* (Yogyakarta: UII Press, 2004).

⁷ Ahmad Jafarul Musadad, "Dinamika Pendidikan Islam Pasca Kemerdekaan di Indonesia," *Thaqafiyat : Jurnal Bahasa, Peradaban dan Informasi Islam* 20, no. 1 (April 6, 2021): 1–23, <https://doi.org/10.14421/thaq.2021.20101>.

⁸ Moch Khafidz Fuad Raya, "Sejarah Orientasi Pendidikan Islam di Indonesia (dari Masa Kolonial hingga Orde Baru)," *Jurnal Pendidikan Islam* 8, no. 2 (2018): 228–42, <https://doi.org/10.38073%2Fjpi.v8i2.202>.

⁹ Rahmat Hidayat et al., "Realita Pendidikan Islam di Indonesia Pasca Kemerdekaan: Perkembangan, Tantangan, dan Prospek Masa Depan," *QuranicEdu: Journal of Islamic Education* 4, no. 2 (2024): 188–204.

¹⁰ Muhammad Sholeh Hoddin, "Dinamika Politik Pendidikan Islam di Indonesia; Studi Kebijakan Pendidikan Islam Pada Masa Pra-Kemerdekaan hingga Reformasi.," *Jurnal Ilmiah Iqra'* 14, no. 1 (October 30, 2020): 15–30, <https://doi.org/10.30984/jii.v14i1.1035>.

¹¹ Zilfadlia Nirmala, "Studi Kritis Tentang Kebijakan Pemerintahan Orde Lama, Orde Baru, dan Era Reformasi terhadap Pendidikan Islam," *Jurnal Religion: Jurnal Agama, Sosial, dan Budaya* 1, no. 6 (2023): 1404–23, <https://doi.org/10.55606/religion.v1i6.875>.

hingga peningkatan kesejahteraan dan profesionalitas guru dan dosen sebagai tombak pendidikan.¹²

Terdapat beberapa penelitian terdahulu yang memiliki bahasan yang identik. Sebagian studi melihat dinamika pendidikan Islam dalam makna tujuan, fungsi, dan tantangan pendidikan.¹³ Sebagian dengan jumlah cukup banyak membaginya dalam periodisasi seperti era kolonial Belanda dan Jepang, Era Orde Lama, Baru, hingga Reformasi yang mana dalam pembahasan dan kesimpulannya kurang terarah pada suatu aspek pendidikan, terkadang fokus pada kebijakan, terkadang perkembangan lembaga, terkadang sisi kurikulum, dan sebagainya.¹⁴ Sebagian yang lain ada yang memiliki corak pembahasan pada periode sempit semisal pendidikan Islam pada Orde Lama, Orde Baru, maupun Reformasi dengan corak penelitian yang luas berbagai aspek pendidikan maupun sempit hanya beberapa aspek saja.¹⁵

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, penulis bermaksud melakukan penelitian dengan tujuan untuk menjabarkan ulang berbagai kebijakan pemerintah terkait pendidikan Islam yang lebih sistematis, padat informasi, dan terklasifikasi baik sesuai era masing-masing. Hal ini

¹² Ana Kurnia Sari and Muhammad Sirozi, "Politik Pendidikan Islam Indonesia Masa Reformasi (1998-Sekarang)," *Tarbawy : Jurnal Pendidikan Islam* 10, no. 1 (April 30, 2023): 20–37, <https://doi.org/10.32923/tarbawy.v10i1.3449>.

¹³ Achmad Sudaryo, "Dinamika Pendidikan Islam di Indonesia," *INTERDISIPLIN: Journal of Qualitative and Quantitative Research* 1, no. 1 (December 16, 2023): 1–9, <https://doi.org/10.61166/interdisiplin.v1i1.1>.

¹⁴ Muhammad Yahdi, "Sejarah Pertumbuhan dan Perkembangan Pendidikan Islam di Indonesia," *Jurnal Pendidikan Kreatif* 4, no. 1 (June 30, 2023): 64–72, <https://doi.org/10.24252/jpk.v4i1.39183>; Hoddin, "Dinamika Politik Pendidikan Islam di Indonesia; Studi Kebijakan Pendidikan Islam Pada Masa Pra-Kemerdekaan hingga Reformasi."; Eva Tri Cahyanti, "Kebijakan Pendidikan Islam di Indonesia: Masa Kolonial Hingga Masa Reformasi," *EDUKASIA: Jurnal Pendidikan dan Pembelajaran* 2, no. 2 (August 11, 2021): 181–97, <https://doi.org/10.62775/edukasia.v2i2.47>.

¹⁵ Lukis Alam, "Kontestasi Kebijakan Pendidikan Islam Di Era Orde Baru dan Reformasi," *Ruhama : Islamic Education Journal* 3, no. 2 (October 9, 2020): 59–79, <https://doi.org/10.31869/ruhama.v3i2.2223>; Afiani Arofatul Zidah, Krisna Ridha Pratama, and Yohanes Purwanto, "Sejarah Perkembangan Pendidikan Islam Era Reformasi di Indonesia," *HISTORIA: Jurnal Program Studi Pendidikan Sejarah* 9, no. 1 (February 28, 2021): 97–106, <https://doi.org/10.24127/hj.v9i1.2528>; Hasbullah Hasbullah and Arizal Eka Putra, "Pendidikan Islam Orde Reformasi (pendekatan Politik dan Kebijakan Pendidikan)," *Ta'lim* 4, no. 1 (February 18, 2022): 23–33, <https://doi.org/10.36269/tlm.v4i1.601>; Siti Aisyah, "Pendidikan Islam pada Masa Reformasi (1998-Sekarang)," *Journal of Islamic Education El Madani* 2, no. 1 (January 20, 2023): 47–56, <https://doi.org/10.55438/jiee.v2i1.39>.

menimbang, para peneliti terdahulu belum ada yang memulai dan mengonstruksi penelitian dengan menggabungkan tiga unsur penting dalam perkembangan pendidikan nasional di Indonesia yang meliputi dinamika kebijakan, lembaga pendidikan Islam, sekaligus para tokohnya. Penulis akan menjabarkan terkait dengan kebijakan nasional dari masa orde lama ke masa reformasi saat ini tentang pendidikan Islam, mencakup terkait peraturan maupun perkembangan kurikulum. Kemudian, tidak lupa penulis akan menjelaskan berbagai lembaga pendidikan Islam utama yang terlibat dalam perkembangan pendidikan Islam, seperti pesantren, madrasah, dan perguruan tinggi Islam. Demikian juga, penulis akan menjabarkan kiprah tokoh-tokoh pendidikan Islam yang dinilai sebagai tokoh representatif pembangunan pendidikan Islam di Indonesia pada rentang masa tersebut. Ketiga unsur tersebut, dinamika kebijakan, perkembangan lembaga pendidikan, dan tokoh sentral yang dijelaskan dengan runtut, sistematis, dan inspiratif akan menjadi nilai kebaruan (*novelty*) utama penelitian ini.

B. METODE

Riset yang dilakukan ini berbentuk sebuah penelitian dengan metode penelitian sejarah. Metode penelitian sejarah didefinisikan sebagai penelitian dengan fokus mengulik dan mengungkap peristiwa atau fenomena masa lalu yang dialami manusia dengan menggambarkan rekonstruksi masa lalu secara runtut dan netral.¹⁶ Secara lebih sederhana, metode penelitian sejarah merupakan sebuah alat untuk membuat reka ulang peristiwa masa lampau menjadi sejarah dalam bentuk kisah.¹⁷ Sumber data dalam penelitian ini menggunakan dan memanfaatkan sumber tertulis seperti buku, artikel jurnal, dan dokumen-dokumen lain yang memiliki muatan tema tentang sejarah pendidikan secara umum maupun pendidikan Islam di Indonesia. Data penelitian diperoleh dengan teknik dokumentasi yang dicapai dengan cara pengumpulan data lewat

¹⁶ Nina Herlina, *Metode Sejarah* (Bandung: Satya Historika, 2020).

¹⁷ Usman DP and Syukeri Gazali, "Pendidikan Islam Dalam Perspektif Metode Penelitian Sejarah," *Darul Ulum: Jurnal Ilmiah Keagamaan, Pendidikan dan Kemasyarakatan* 13, no. 1 (June 30, 2022): 51–74, <https://doi.org/10.62815/darululum.v13i1.78>.

penelusuran sumber-sumber tertulis seperti buku, kitab, artikel, dan lain-lain yang memiliki relevansi dan keterkaitan dengan topik penelitian.¹⁸

Teknik analisis data yang digunakan dalam riset ini ialah teknik analisis konten (*content analysis*), dimana melalui teknik analisis ini memberikan ruang bagi peneliti untuk membuat interpretasi berupa deskripsi dan penjabaran terhadap sumber data pustaka berupa teks.¹⁹ Pada penelitian ini, penulis akan mendeskripsikan sejarah dinamika sistem pendidikan Islam di Indonesia mulai awal dari pasca kemerdekaan hingga masa reformasi ini. Deskripsi dinamika kebijakan dan sistem pendidikan Islam tersebut diperkaya dengan uraian tumbuh dan kembangnya lembaga-lembaga pendidikan Islam di Indonesia dari awal kemerdekaan hingga masa Reformasi beserta peran sentral dari tokoh-tokoh penting dalam perkembangan pendidikan Islam.

C. DESKRIPSI DAN PEMBAHASAN

Dinamika Kebijakan Sistem Pendidikan Islam Era Orde Lama

Gebrakan paling awal setelah kemerdekaan, pemerintah berkomitmen lewat Badan Pekerja Komite Nasional Pusat untuk menggelontorkan insentif materil kepada madrasah dan pesantren. Dalam pernyataan resmi lembaga tersebut pada tanggal 27 Desember 1945 mengakui bahwa dua lembaga pendidikan tersebut merupakan sumber dan tempat meraih pendidikan bagi yang telah eksis berabad-abad di dalam tubuh masyarakat Indonesia secara luas maka selayaknya dapat diberi bantuan berupa dukungan moral dan materil dari negara.²⁰ Langkah lain yang amat progresif juga dibuktikan dengan pemerintah membentuk Kementerian Agama. Kementerian Agama dibentuk dan disahkan dalam kabinet ketiga dari pemerintahan Republik Indonesia pada masa kepemimpinan Perdana Menteri Sutan Syahrir pada 12 Maret 1946 M di Yogyakarta.²¹

¹⁸ Mestika Zed, *Metode Penelitian Kepustakaan* (Jakarta: Yayasan Obor, 2004).

¹⁹ Yuli Asmi Rozali, "Penggunaan Analisis Konten Dan Analisis Tematik," *Forum Ilmiah Volume* 19, no. 1 (2022): 68–76.

²⁰ Hasbullah, *Sejarah Pendidikan Islam Di Indonesia* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1999).

²¹ Mahmud Yunus, *Sejarah Pendidikan Islam Di Indonesia*.

Mentri Agama pertama kali diemban oleh H. Rasyidi yang kemudian dilanjutkan pada kabinet keempat oleh H. Fathur Rahman. Pemerintah pada masa awal ini mencoba untuk melakukan integrasi pendidikan agama pada sekolah-sekolah umum. Maka dari itu, pada masa Fathur Rahman ditetapkanlah kebijakan bersama Kementerian Pengajaran, Pendidikan dan Kebudayaan yang saat itu dipegang oleh Ki Hajar Dewantara perihal penyelenggaraan pendidikan agama di sekolah. Isi kebijakan tersebut mengatur pendidikan agama hanya diajarkan mulai kelas IV sedangkan untuk kelas I-III tidak diperkenankan. Kesepakatan menjadi titik awal proyeksi tersedianya mata pelajaran agama kurikulum sekolah umum. Namun, kebijakan ini terhambat sehingga tertunda pelaksanaannya.²²

Setelah ibukota kembali ke Jakarta, barulah dimulai pelaksanaan kebijakan pengajaran pendidikan agama di sekolah. Langkah tersebut direalisasikan dengan pengesahan Undang-Undang Pokok Pendidikan No. 4 Tahun 1950 dan Undang-Undang Pendidikan No. 12 Tahun 1954 yang memuat pengajaran pelajaran agama di sekolah negeri.²³ Lebih lanjut, peraturan ini juga menjelaskan jumlah jam mata pelajaran agama diajarkan mulai dari jenjang dasar (SD) hingga sekolah lanjutan (SLTA). Nilai pelajaran agama pada masa ini tak menjadi prasyarat kenaikan kelas.²⁴ Guna memperlancar implementasi penyelenggaraan pelajaran agama di sekolah negeri, dibentuklah Panitia Perencana Pendidikan Agama Islam pada 1951 yang dipimpin oleh K.H. Imam Zarkasyi. Setelah beberapa waktu pelaksanaan, pemerintah memandang perlu membentuk Japenda (Jawatan Pendidikan Agama). Tugas pokok dan fungsinya meliputi pengelolaan pengajaran pelajaran agama di sekolah, pengajaran agama di lembaga madrasah, dan mengembangkan tingkat kompetensi guru dan petugas agama melalui pelatihan-pelatihan.²⁵

²² Amirah Mawardi, "Perkembangan Kurikulum Pendidikan Agama Islam di Indonesia," *TARBAWI : Jurnal Pendidikan Agama Islam* 1, no. 1 (January 20, 2017): 29–36, <https://doi.org/10.26618/jtw.v1i1.350>.

²³ Haidar Putra Daulany, *Pendidikan Islam Di Indonesia: Historis Dan Eksistensinya* (Jakarta: Prenadamedia Grup, 2019).

²⁴ Yuliani and Edy Purwanto, "Pendidikan Islam Di Indonesia Setelah Merdeka."

²⁵ Jafarul Musadad, "Dinamika Pendidikan Islam Pasca Kemerdekaan di Indonesia."

Selama masa Orde Lama, pendidikan Islam diatur mode dualisme kepengurusan. Kementerian Agama memiliki otonomi untuk mengelola pendidikan agama di madrasah, pesantren, maupun di sekolah umum yang berada di bawah Kementerian Pengajaran Pendidikan dan Kebudayaan. Sementara Kementerian PPK mengatur jalannya pendidikan secara umum dan lebih luas. Kehadiran pendidikan agama di sekolah sempat digusari oleh kelompok komunis.²⁶ Namun, hal tersebut tak menyurutkan langkah pemerintah dalam mengakomodasi kebutuhan umat Islam.

Inisiasi cemerlang lainnya pada masa ini adalah pencetusan program wajib belajar 8 tahun madrasah pada tahun 1959. Namun program ini tak berjalan mulus dikarenakan problematika internal maupun eksternal masyarakat.²⁷ Pada era ini, Kemenag juga mulai mendorong pesantren untuk mengadopsi sistem klasikal dan ikut menyediakan pengajaran ilmu umum.²⁸ Pada akhir Era Orde Lama, terbitlah keputusan kewajiban penyediaan materi ajar pendidikan agama di seluruh jenjang pendidikan formal melalui pleno sidang MPRS pada Desember 1960.²⁹

Dinamika Kebijakan Sistem Pendidikan Islam Era Orde Baru

Pendidikan Islam mulai tumbuh dan berkembang selaras dengan kesadaran masyarakat akan agama sebagai benteng ajaran komunis.³⁰ Langkah awal pemerintah dalam mengawal pertumbuhan pendidikan agama Islam diwujudkan lewat pemetaan ulang program pendidikan Islam yang telah eksis di masa itu guna memperbaiki pemberdayaan masing-masing satuan institusi tersebut. Berbagai lembaga pendidikan Islam masuk dalam pemetaan ini, diantaranya, Pesantren Tradisional-Klasik, Madrasah Diniyah (madrasah agama selepas pembelajaran umum di

²⁶ Hasbullah, *Sejarah Pendidikan Islam Di Indonesia*.

²⁷ Titi Anjasari, "Kebijakan Pendidikan Islam di Era Orde Lama dan Orde Baru," *Jurnal Studi Islam dan Kemuhammadiyah (JASIKA)* 2, no. 2 (September 30, 2022): 141–55, <https://doi.org/10.18196/jasika.v2i2.34>.

²⁸ Muhammad Azzami, Sangkot Sirait, and Muqowim Muqowim, "Reintegration of Islamic Education: New Direction for the Transformation of Madrasah Education," *AL-ISHLAH: Jurnal Pendidikan* 16, no. 4 (December 25, 2024): 5357–68, <https://doi.org/10.35445/alishlah.v16i4.5931>.

²⁹ Anjasari, "Kebijakan Pendidikan Islam di Era Orde Lama dan Orde Baru."

³⁰ Haidar Putra Daulay, *Sejarah Pertumbuhan Dan Pembaruan Pendidikan Islam Di Indonesia* (Jakarta: Prenadamedia Grup, 2018).

sekolah), Madrasah Modern Swasta, Madrasah Negeri (meliputi jenjang ibtdaiyyah, tsanawiyah, dan 'aliyah), Madrasah Negeri khusus jenjang dasar, dan Pendidikan Tinggi Islam Negeri.³¹ Selain perbaikan pengelolaan, pemerintah melalui sidang MPR kembali menegaskan pendidikan agama termasuk pelajaran wajib diselenggarakan pada satuan pendidikan sekolah.

Kebijakan besar juga terlahir pada masa ini dengan penghidupan kembali rencana formalisasi madrasah sesuai dengan amanat TAP MPRS No. XXVII.³² Keputusan tersebut dilanjutkan dengan pengetokan Inpres No. 15 Tahun 1974 perihal Peningkatan Mutu Pendidikan di Lingkungan Departemen Agama.³³ Dengan sebab instruksi ini, tiga kementerian sepakat menyelesaikan SKB yang ditandatangani oleh para pemimpin di tiga kementerian yaitu Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Departemen Agama, dan Departemen pada tahun 1975. Peraturan bersama tersebut memuat pengakuan legalitas formal ijazah madrasah, penyetaraan level ijazah madrasah dengan ijazah sekolah negeri, kebolehan siswa madrasah untuk pindah atau melanjutkan jenjang pendidikan ke sekolah. Masih dalam peraturan yang sama, terdapat perubahan komposisi kurikulum madrasah menjadi 70% pelajaran umum dan pelajaran agama sebanding sisanya 30%.³⁴

Selain perbaikan mutu madrasah, pemerintah berhasil mengesahkan Undang-Undang No. 2 Tahun 1989 yang mengatur Sistem Pendidikan Nasional. Peraturan ini kemudian ditindaklanjuti dengan Peraturan Pemerintah No. 28 dan 29 yang diiringi dengan keluarnya SK Menteri PP dan K bersama Menteri Agama yang mendeklarasikan definisi ulang tentang madrasah sebagai sekolah yang memiliki kekhasan berupa agama Islam dengan variasi dan kuantitas mata pelajaran agama lebih

³¹ Hasbullah, *Sejarah Pendidikan Islam Di Indonesia*.

³² Ida Zahara Adibah, "Dinamika Lembaga Pendidikan Islam Di Indonesia Pada Masa Orde Baru (1966-1998)," *Jurnal Inspirasi* 14, no. 2 (2020): 110–26, <https://doi.org/10.61689/inspirasi.v4i2.194>.

³³ Hidayat et al., "Realita Pendidikan Islam di Indonesia Pasca Kemerdekaan: Perkembangan, Tantangan, dan Prospek Masa Depan."

³⁴ Zulkifli and Muhammad, "Perkembangan Kurikulum Pendidikan Agama Islam Di Indonesia (Telaah Kurikulum PAI Pra Kemerdekaan hingga Kurikulum Merdeka)," *JURNAL PAI: Jurnal Kajian Pendidikan Agama Islam* 2, no. 2 (December 31, 2023): 142–61, <https://doi.org/10.33507/pai.v2i2.1146>.

banyak dibandingkan di sekolah negeri.³⁵ Tidak terluput pula, esensi madrasah sebagai sekolah kader da'i juga tetap dipertahankan lewat pendirian Madrasah Aliyah Program Khusus yang memuat mata pelajaran agama dengan porsi 70% dibandingkan dengan pelajaran umum yang hanya 30%.³⁶ Selain berbagai kemajuan di atas, terdapat fakta lembaga pesantren masih termarginalkan dalam sistem pendidikan nasional. UU No. 2 Tahun 1989 tentang Sisdiknas secara nyata menggolongkannya sebagai pendidikan luar sekolah, sehingga terputuslah pesantren dengan madrasah sebagai entitas yang dibedakan di bawah Kemenag.³⁷

Dinamika Kebijakan Sistem Pendidikan Islam Era Reformasi

Pada awal reformasi, kelahiran Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 dengan muatan sistem pendidikan nasional terbaru dianggap sebagai reformasi awal dunia pendidikan secara umum di Indonesia.³⁸ Undang-undang resmi memuat nomenklatur madrasah secara tegas, setelah sebelumnya hanya disebutkan dalam peraturan di bawahnya. Peraturan sistem pendidikan terbaru ini juga telah memetakan klasifikasi institusi pendidikan Islam formal, informal, dan non-formal. Pengesahan undang-undang ini diiringi dengan kewajiban alokasi 20% APBN sejumlah 20% dalam bidang pendidikan, termasuk pendidikan Islam.³⁹ Naiknya alokasi dana pendidikan juga membawa kabar gembira bagi guru dan dosen dengan adanya kebijakan sertifikasi yang diatur dalam PP No. 74 Tahun 2005 sebagai gebrakan pemerintah untuk meningkatkan kualitas dan

³⁵ Haidar Putra Daulany, *Pendidikan Islam Di Indonesia: Historis Dan Eksistensinya*.

³⁶ Nirmala, "Studi Kritis Tentang Kebijakan Pemerintahan Orde Lama, Orde Baru, dan Era Reformasi terhadap Pendidikan Islam."

³⁷ Sarno Hanipudin, "Pendidikan Islam di Indonesia dari Masa ke Masa," *Matan : Journal of Islam and Muslim Society* 1, no. 1 (October 26, 2019): 39, <https://doi.org/10.20884/1.matan.2019.1.1.2037>.

³⁸ Amin Maghfuri, "Analisis Politik Dan Kebijakan Pendidikan Islam Pada Awal Orde Reformasi (1998-2004)," *TADBIR : Jurnal Manajemen Pendidikan Islam* 8, no. 1 (2020): 14–26.

³⁹ Zidah, Pratama, and Purwanto, "Sejarah Perkembangan Pendidikan Islam Era Reformasi di Indonesia."

kesejahteraan mereka.⁴⁰ Imbas lain juga diterima oleh peserta didik dengan adanya program wajib belajar menjadi 9 tahun.⁴¹

Proses masa reformasi juga diwarnai dengan dinamika perubahan kurikulum sebanyak empat kali. Kurikulum pertama yang lahir adalah Kurikulum Berbasis Kompetensi (KBK) pada tahun 2004 yang dirancang sebagai peta global seluruh mata pelajaran yang layak dan perlu untuk diajarkan pada setiap level pendidikan. Belum genap dua tahun, terbitlah Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) sebagai jelmaan yang disempurnakan dari KBK dengan ciri khas akomodasi muatan lokal.⁴² Satuan institusi pendidikan diberi kebebasan untuk menambah bahan ajar muatan lokal dalam kurikulum.⁴³ Setelah berjalan tujuh tahun, muncullah Kurikulum 13 (K13) yang berorientasi mengkader peserta didik yang cakap sikap (afektif), pengetahuan (kognitif), sosial, dan keterampilan (psikomotorik).⁴⁴ Setelah cukup lama dijalankan, disahkanlah Kurikulum Merdeka (Kumer) sebagai kurikulum adaptasi dari kondisi disrupsi pandemi covid-19 dengan jargon belajar kontekstual, esensial, dan berpusat pada siswa.⁴⁵

Perkembangan Lembaga Pendidikan Islam Pasca Kemerdekaan Pondok Pesantren

Pengertian pondok pesantren, apabila dilihat dari unsur kata pembentuk frasa, memiliki dua unsur yaitu kata “pondok” dan “pesantren”. Terminologi “pondok” merupakan serapan bahasa Arab yang memiliki arti

⁴⁰ Nadhif Muhammad Mumtaz, “Kebijakan Pendidikan Islam Dari Masa Ke Masa,” *Jurnal Pendidikan Tambusai* 6, no. 2 (2022): 16511–24.

⁴¹ Nirmala, “Studi Kritis Tentang Kebijakan Pemerintahan Orde Lama, Orde Baru, dan Era Reformasi terhadap Pendidikan Islam.”

⁴² Aisyah, “Pendidikan Islam pada Masa Reformasi (1998-Sekarang).”

⁴³ Khoirunnisaa Sholihah Luthfi Alya’, “Perkembangan Kurikulum Pendidikan Agama Islam di Indonesia,” *Risalah: Jurnal Pendidikan dan Studi Islam* 9, no. 4 (2023): 1678–89, https://doi.org/10.31943/jurnal_risalah.v9i4.666.

⁴⁴ Ahmad Mukhtar, Yusril Ihza Mahendra, and Andi Sermayana, “Analisis Perbandingan Efektivitas Penerapan Kurikulum 2013 dan Kurikulum Merdeka pada Mata Pelajaran Pendidikan Agama Islam,” *JIIIC: JURNAL INTELEK INSAN CENDIKIA* 1, no. 2 (2024): 130–43.

⁴⁵ Ahmad Siddiq, “Reforms on Islamic Education in Indonesia (A Case of Pesantren, Madrasah, and Islamic University),” *Shibghoh: Prosiding Ilmu Kependidikan UNIDA Gontor* 1 (May 5, 2023): 67–78.

suatu area yang digunakan sebagai persinggahan.⁴⁶ Adapun terminologi santri punya asal usul bahasa Tamil yang artinya tempat yang diselenggarakan kegiatan keagamaan. Tujuan utama pesantren adalah mencetak calon-calon ulama. Menurut para peneliti, pesantren merupakan lembaga pendidikan paling kuno dan tradisional yang tumbuh di nusantara.⁴⁷

Ciri-ciri pendidikan pesantren terkonsentrasi pada kajian ilmu keagamaan dengan metode pembelajaran lama seperti sorogan, badongan, dan hafalan non klasikal.⁴⁸ Ciri-ciri khas yang lain di pesantren adalah adanya budaya pelestarian sanad silsilah keilmuan.⁴⁹ Sebelum kemerdekaan, pesantren memiliki tugas sebagai tempat perlawanan dan pemupuk semangat nasionalisme.⁵⁰ Setelah kemerdekaan cukup banyak sumbangsih pemerintah terhadap lembaga pendidikan yang satu ini, tetapi masih terjadi gap yang cukup menganga apabila dilihat dari kancah pendidikan nasional. Meskipun secara yuridis diakui sebagai institusi pendidikan resmi, tetapi pemerintah tak kunjung menetapkan ijazah pesantren selevel dengan institusi pendidikan formal lainnya, layaknya madrasah. Boleh jadi karena pertimbangan pesantren masih bertahan pada ciri khas pengajaran kitab-kitab klasik dan sedikit membuka pendidikan non agama.

Pada Era Reformasi, pemerintah resmi mengetok Undang-Undang Nomor 18 tahun 2019 sebagai sarana penguatan regulasi penyelenggaraan pendidikan pesantren.⁵¹ Undang-undang ini mengatur bagaimana

⁴⁶ KM Akhiruddin, "Lembaga Pendidikan Islam di Nusantara," *JURNAL TARBIYA* 1, no. 1 (2015): 195–219.

⁴⁷ Yuliani and Edy Purwanto, "Pendidikan Islam Di Indonesia Setelah Merdeka."

⁴⁸ Haidar Putra Daulay, *Pendidikan Islam Dalam Sistem Pendidikan Nasional*; Muhammad Nasrudin et al., "Strategi Epistemologis Implementasi Pendidikan Holistik Pada Pondok Pesantren," *Ulumuddin : Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman* 11, no. 1 (June 2021): 69–84, <https://doi.org/10.47200/ulumuddin.v11i1.767>.

⁴⁹ Muhammad Basyrul Muvid, *Studi Lembaga Pendidikan Islam Di Indonesia Dari Era Klasik Hingga Era Kontemporer* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2022).

⁵⁰ Hidayat et al., "Realita Pendidikan Islam di Indonesia Pasca Kemerdekaan: Perkembangan, Tantangan, dan Prospek Masa Depan."

⁵¹ Muhammad Usman and Anton Widyanto, "Undang-Undang Pesantren: Meneropong Arah Kebijakan Pendidikan Pesantren di Indonesia," *Ar-Raniry, International Journal of Islamic Studies* 8, no. 1 (2021): 57–70, <https://doi.org/10.22373/jar.v8i1.10991>.

pesantren menjadi lembaga pendidikan baik fungsi pendidikan, fungsi dakwah, dan fungsi pemberdayaan masyarakat.⁵² Hadirnya peraturan ini, tidak mengubah ciri khas pesantren, melainkan hadir sebagai rekognisi dan fasilitas dari pemerintah untuk menyelamatkan dan mengembangkan pendidikan pesantren.⁵³

Madrasah

Terminologi madrasah memiliki asal muasal dari bahasa Arab “*madrasatun*” yang memuat makna “tempat yang digunakan dalam proses belajar-mengajar”.⁵⁴ Pendidikan di madrasah dilakukan secara terstruktur, sistematis, dan terukur. Madrasah hadir sebagai lembaga pendidikan Islam formal yang kurikulumnya mengadopsi dan mengikuti kurikulum nasional dengan ciri khas pengajaran mata pelajaran Al-Qur'an & Hadis, Fikih, Akidah & Akhlak, Bahasa Arab, dan Sejarah Islam yang tidak diterima di sekolah.⁵⁵ Perkembangan madrasah setelah era kemerdekaan hingga masa reformasi dapat dibagi menjadi tiga fase. Fase pertama (1945-1974), madrasah yang terkonsentrasi mengajarkan materi keagamaan, sehingga penyetaraan ijazah antara madrasah dan sekolah belum bisa dicapai. Fase kedua (1975-1989), madrasah memasuki era SKB Tiga Menteri yang membuka ruang bagi tamatan madrasah, ijazah mereka dianggap setara dengan ijazah sekolah umum. Fase ketiga (1990-sekarang), madrasah berubah menjadi sekolah berciri Islam yang mengajarkan materi agama

⁵² Panut Panut, Giyoto Giyoto, and Yusuf Rohmadi, “Implementasi Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 Tentang Pesantren Terhadap Pengelolaan Pondok Pesantren,” *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 7, no. 2 (July 5, 2021): 816–28, <https://doi.org/10.29040/jiei.v7i2.2671>.

⁵³ Sahara Adjie Samudera, “Undang-Undang Pesantren Sebagai Landasan Pembaruan Pondok Pesantren di Indonesia (Studi Kebijakan UU No. 18 Tahun 2019),” *Fahima* 2, no. 2 (July 6, 2023): 186–200, <https://doi.org/10.54622/fahima.v2i2.92>.

⁵⁴ Yayah Chairiyah, “Sejarah Perkembangan Sistem Pendidikan Madrasah Sebagai Lembaga Pendidikan Islam,” *MA'ALIM: Jurnal Pendidikan Islam* 2, no. 1 (June 1, 2021), <https://doi.org/10.21154/maalim.v2i01.3129>.

⁵⁵ Muhammad Nasir, “Sejarah Lembaga Pendidikan Islam (madrasah) di Indonesia,” *Jurnal Ilmiah Al Qalam* 11, no. 24 (2017): 1–12, <http://dx.doi.org/10.35931/aq.voio.15>; Tedi Priatna, “Demography of Madrasah Diniyah Takmiliyah and Revitalizing the Institutional Function of Islamic Education,” *Journal of Southwest Jiaotong University* 55, no. 1 (2020), <https://jsju.org/index.php/journal/article/view/519>.

lebih bervariasi, lingkungan belajar dan pembentukan karakter Islami diupayakan lebih kuat dibanding sekolah.⁵⁶

Lembaga Perguruan Tinggi Islam di Indonesia

Pembentukan sekolah tinggi Islam pertama di Indonesia lahir dari gagasan dan prakarsa Masyumi (Majelis Syura Muslimin Indonesia) dengan pendirian STI (Sekolah Tinggi Islam tepat pada 8 Juli 1945 dengan mengadopsi kurikulum Jami'ah Al-Azhar Kairo.⁵⁷ Setelah beberapa waktu berjalan, dilakukanlah transformasi bentuk STI menjadi Universitas Islam Indonesia pada 10 Maret 1948 yang ditandai dengan pembukaan fakultas baru seperti hukum, pendidikan, dan ekonomi.⁵⁸ Tidak lama setelah transformasi tersebut tersebut, pemerintah mengakuisisi fakultas agama UII menjadi PTKIN pertama di Indonesia melalui Perpres No. 34 tahun 1950 dengan tiga program sarjana, yaitu Hukum Islam, Pendidikan Islam, dan Dakwah.⁵⁹ Departemen Agama juga mendirikan Akademisi Dinas Ilmu Agama (AIDA) yang digunakan sebagai pendidikan lanjutan khusus pegawai negeri agama pada tahun 1957. Setelah berjalan tiga tahun, pemerintah melebur dua institusi tersebut menjadi satu dengan nama Institut Agama Islam Negeri berdiri melalui Perpres No. 11 tahun 1960 yang berkedudukan di Yogyakarta.⁶⁰

Selama era orde baru hingga awal reformasi, IAIN tumbuh di berbagai daerah dan bertransformasi menjadi universitas yang diawali oleh

⁵⁶ Haidar Putra Daulay, *Sejarah Pertumbuhan Dan Pembaruan Pendidikan Islam Di Indonesia*.

⁵⁷ Hasbi Indra et al., "Islamic Higher Education, Its Dynamics and Role From Time to Time," *Tafkir: Interdisciplinary Journal of Islamic Education* 6, no. 2 (May 15, 2025): 402–19, <https://doi.org/10.31538/tijie.v6i2.1726>.

⁵⁸ Haidar Putra Daulay, *Pendidikan Islam Dalam Sistem Pendidikan Nasional*.

⁵⁹ Ifa Afida, "Historitas Lembaga Pendidikan Islam di Indonesia," *FALASIFA : Jurnal Studi Keislaman* 9, no. 1 (March 25, 2018): 17–34, <https://doi.org/10.36835/falasifa.v9i1.97>.

⁶⁰ Hasan Asari, "Perkembangan Pendidikan Tinggi Islam Di Indonesia," in *Sejarah Pertumbuhan Dan Perkembangan Lembaga-Lembaga Pendidikan Islam Di Indonesia* (Jakarta: Salemba Diniyah, 2017), 167–88; Muhammad Irfan Helmy, Ahmad Darajat Jumadil Kubro, and Muhamad Ali, "The Understanding of Islamic Moderation (Wasatiyyah al-Islam) and the Hadiths on Inter-Religious Relations in the Javanese Pesantrens," *Indonesian Journal of Islam and Muslim Societies* 11, no. 2 (December 8, 2021): 377–401, <https://doi.org/10.18326/ijims.v11i2.351-376>; Toto Hermawan et al., "How Santri Learn Entrepreneurship: A Case Study," *Proceeding of Annual International Conference on Islamic Education and Language (AICIEL)*, December 17, 2025, 613–22.

UIN Syarif Hidayatullah Jakarta dengan pembukaan jurusan kuliah ilmu umum non agama. Hingga tahun 2024, terdapat 24 UIN dari total 58 perguruan tinggi Islam negeri atau PTKIN yang tercatat, artinya ada 40% lebih dari total perguruan tinggi negeri Islam sudah berbentuk universitas.⁶¹ Selain perguruan tinggi negeri, telah berdiri juga berbagai perguruan tinggi Islam sejak masa orde lama, semisal Universitas Islam Jakarta (UIJ) sejak 1951, Universitas Islam Sumatra Utara (UISU) sejak 1952, Universitas Islam Darul Hikmah tahun 1975.⁶² Selain dari berbagai yayasan swasta, menjamur pula perguruan tinggi Islam yang dikelola oleh ormas Islam besar Muhammadiyah, Nahdhatul Ulama, dan lain-lain.⁶³

Tokoh Pembaru Pendidikan Islam Pasca Kemerdekaan Abdul Wahid Hasyim

Abdul Wahid Hasyim ialah tokoh pendidikan yang menjadi reformis dunia pesantren mengenal ilmu-ilmu modern untuk menghilangkan dikotomisasi antara agama dan sains.⁶⁴ Abdul Wahid Hasyim dilahirkan di Tebuireng, Jombang Jawa Timur tepat pada 1 Juni 1914. Beliau merupakan anak dari pendiri NU dan Ponpes Tebuireng yaitu Hadhratus Syeikh Hasyim Asy'ari.⁶⁵ Umur beliau tidaklah panjang. Beliau wafat pada 18 April 1953 saat takdir sebuah kecelakaan.⁶⁶ Kriprah tertinggi beliau di NU adalah jabatan ketua umum. Sementara dalam kancah pemerintahan, aktif sebagai

⁶¹ Suyadi et al., "Academic Reform and Sustainability of Islamic Higher Education in Indonesia," *International Journal of Educational Development* 89 (March 1, 2022): 102534, <https://doi.org/10.1016/j.ijedudev.2021.102534>; Fattah Setiawan Santoso et al., "The Future Of Islamic Law Studies At Indonesia Islamic Higher Education," *Proceeding of Annual International Conference on Islamic Education and Language (AICIEL)*, November 30, 2023, 622–28.

⁶² Desmaniar et al., "Towards Sustainable Development of Islamic Higher Education: A Meta-Analysis of Challenges and Opportunities," *Millah: Journal of Religious Studies*, October 13, 2022, 741–70, <https://doi.org/10.20885/millah.vol21.iss3.art5>.

⁶³ Sofyan Rofi, *Sejarah Pendidikan Islam Di Indonesia* (Sleman: Deepublish, 2020).

⁶⁴ Umi Musaropah, "Pendidikan Kebangsaan dalam Pesantren Perspektif Abdul Wahid Hasyim," *Ulumuddin : Jurnal Ilmu-ilmu Keislaman* 9, no. 1 (November 23, 2019): 1–22, <https://doi.org/10.47200/ulumuddin.v9i1.284>.

⁶⁵ Musaropah.

⁶⁶ Yustifa Tariful Mujiana Khariyah, "Peran K.H Abdul Wahid Hasyim dalam Pendidikan dan Pengaruhnya dalam Pendidikan Islam," *Jurnal Studi Islam dan Kemuhammadiyahan (JASIKA)* 2, no. 1 (April 13, 2022), <https://doi.org/10.18196/jasika.v2i1.17>.

anggota BPUPKI, PPKI hingga diamanahi menjadi Menteri Negara pada periode 1945-1949, Menteri Agama sepanjang tahun 1949-1953.⁶⁷

Dalam bidang pendidikan Islam, sosok beliau dikenal sebagai figur yang mengenalkan sistem klasikal di lingkungan pesantren di Tebuireng. Abdul Wahid juga mempopulerkan pelajaran non agama seperti pidato, bahasa asing, dan keterampilan mengetik di pesantren.⁶⁸ Menurut beliau, belajar di pesantren tak menuntut harus jadi ulama dan memotivasi santri ponpes untuk belajar ilmu-ilmu pengetahuan lain agar tumbuh maju. Selain kontribusi dalam dunia pesantren, beliau juga berjasa sebagai menteri yang berhasil mendirikan pendidikan tinggi guru agama bernama PGA (Pendidikan Guru Agama) dan PTAIN (Perguruan Tinggi Agama Islam Negeri) pertama tahun 1950. Era kepemimpinan Abdul Wahid juga sukses melakukan pengakuan lulusan sekolah agama dianggap memenuhi cakap belajar dan pengintegrasian pelajaran agama di sekolah negeri lewat Peraturan Menteri Agama No. 4 Tahun 1950.⁶⁹

Mahmud Yunus

Mahmud Yunus dikenal sebagai pejuang dan pembaharu pendidikan Islam yang banyak mengenalkan sistem klasikal dalam dengan kiprahnya banyak berkontribusi dalam pemajuan dan pendirian berbagai jenis lembaga pendidikan Islam dengan tatanan lebih modern.⁷⁰ Beliau adalah sosok tokoh pendidikan asli Padang yang dilahirkan pada 10 Februari 1899. Beliau tumbuh dalam didikan keluarga ulama. Beliau juga mengisi masa kecil dengan menimba ilmu kepada para ulama Minang sampai beliau

⁶⁷ Agung Syahrman and Agus Mulyana, "Peranan Kh. Abdul Wahid Hasyim Dalam Pemerintahan Indonesia Tahun (1945-1953)," *FACTUM: Jurnal Sejarah dan Pendidikan Sejarah* 8, no. 1 (September 23, 2019): 15–32, <https://doi.org/10.17509/factum.v8i1.20113>.

⁶⁸ Ana Rodhiyatus Sholikhah and Muqowim, "Pemikiran Pendidikan Menurut KH Abdul Wahid Hasyim," *Cakrawala Jurnal Manajemen Pendidikan Islam dan studi sosial* 6, no. 1 (June 28, 2022): 44–54, <https://doi.org/10.33507/cakrawala.v6i1.350>.

⁶⁹ Moh. Ismail, "Demokratisasi Pendidikan Islam dalam Pandangan KH. Abdul Wahid Hasyim," *Jurnal Pendidikan Agama Islam (Journal of Islamic Education Studies)* 4, no. 2 (November 2, 2016): 315, <https://doi.org/10.15642/jpai.2016.4.2.315-336>.

⁷⁰ Sahrul Ramadhan and M. Ihsan, "Pemikiran Mahmud Yunus Tentang Pendidikan Agama Islam," *Jurnal Pendidikan, Sains, Geologi, dan Geofisika (GeoScienceEd Journal)* 6, no. 2 (April 30, 2025): 959–64, <https://doi.org/10.29303/goescienceed.v6i2.1039>.

sendiri aktif dalam perkumpulan ulama Minangkabau.⁷¹ Yunus juga pernah mengenyam pendidikan tinggi di Al-Azhar, Mesir sampai tahun 1931.⁷² Setelah kepulangannya dari Mesir, beliau pun memulai kiprah kontribusi dalam pendidikan Islam dengan mendirikan Al-Jami'ah Al-Islamiyyah di Padang.⁷³ Sekolah ini menerapkan kurikulum pendidikan modern yang memadukan antara kurikulum agama dan ilmu-ilmu duniawi yang terdiri dari tiga tingkatan jenjang pendidikan, pertama, *Ibtidaiyyah* selama 4 tahun, kedua, *Tsanawiyyah* selama 4 tahun, dan ketiga, *'Aliyyah* selama 4 tahun juga.⁷⁴

Dalam kancah pemerintahan, beliau pernah menjabat sebagai Kepala Bagian Islam Provinsi Sumatera hingga menjadi Penghubung Pendidikan Agama Departemen Agama di Jakarta yang aktif menyerukan pendidikan agama masuk ke pelajaran sekolah yang kemudian berhasil diwujudkan hingga nama beliau dikenal khalayak.⁷⁵ Jejak perjuangan beliau juga pernah terekam sebagai pemimpin Kuliah Mu'allimin Normal Islam di Padang, Akademisi Dinas Ilmu Agama (ADIA) di Jakarta, menjadi Dekan Fakultas Tarbiyah di IAIN Syarif Hidayatullah, dan sebagai rektor IAIN Imam Bonjol Padang.⁷⁶ Beliau juga memiliki saham kontribusi dalam pendirian berbagai sekolah khusus SGHA (Sekolah Guru dan Hakim Agama) dan PGA (Pendidikan Guru Agama), penyetaraan ijazah madrasah, dan ikut bersama dalam pendirian pendidikan tinggi Islam negeri atau PTAIN pertama di Indoensia.⁷⁷

⁷¹ Teti Depita, "Pemikiran Mahmud Yunus Tentang Pendidikan Islam," *Jurnal Tawadhu* 8, no. 1 (April 22, 2024): 41–56, <https://doi.org/10.52802/twd.v8i1.795>.

⁷² Muhammad Abdulloh, "Pembaharuan Pemikiran Mahmud Yunus Tentang Pendidikan Islam Dan Relevansinya Dengan Pendidikan Modern," *AL MURABBI* 5, no. 2 (June 27, 2020): 22–33, <https://doi.org/10.35891/amb.v5i2.2109>.

⁷³ Moh Asror, M. Yunus Abu Bakar, and Ah. Zakki Fuad, "Modernisme Pendidikan Islam dalam Pemikiran Mahmud Yunus: Analisis dan Relevansinya dalam Peningkatan Mutu Pendidikan Islam Indonesia Era Society 5.0," *Jurnal Pendidikan Agama Islam Al-Thariqah* 8, no. 1 (June 29, 2023): 35–52, [https://doi.org/10.25299/al-thariqah.2023.vol8\(1\).11693](https://doi.org/10.25299/al-thariqah.2023.vol8(1).11693).

⁷⁴ Fauza Masyhudi, "Pemikiran Mahmud Yunus Tentang Konsep Pendidikan Islam," *JURNAL TARBIYAH* 21, no. 1 (2014): 96–118.

⁷⁵ Abdulloh, "Pembaharuan Pemikiran Mahmud Yunus Tentang Pendidikan Islam Dan Relevansinya Dengan Pendidikan Modern."

⁷⁶ Depita, "Pemikiran Mahmud Yunus Tentang Pendidikan Islam."

⁷⁷ Syeh Hawib Hamzah, "Pemikiran Mahmud Yunus Dalam Pembaruan Pendidikan Islam Di Indonesia," *Dinamika Ilmu* 14, no. 1 (2014): 123–47.

Imam Zarkasyi

K.H. Imam Zarkasyi dikenal sebagai tokoh pembaharu dalam dunia pesantren modern dengan *opus magnum* pendirian Pondok Pesantren Modern Gontor dengan gagasan progresif beliau tentang pentingnya penguasaan santri terhadap ilmu-ilmu umum.⁷⁸ Beliau dilahirkan pada 21 Maret 1910 di Gontor Ponorogo dan hidup dalam keadaan yatim.⁷⁹ Imam Zarkasyi muda menamatkan belajar di berbagai pesantren dekat dengan kampung halaman hingga yang paling jauh di Kweekschool di tanah Minang.⁸⁰ Kiprah seorang Imam Zarkasyi dalam dunia pendidikan diawali dengan pengembangan Pondok Pesantren Gontor bersama Kyai Ahmad Sahal dan Zainuddin Fanani. Pondok Gontor “Lama” berhasil ditransformasikan menjadi Pondok Pesantren Gontor “Baru” lewat modernisasi sistem pembelajaran yang memadukan kurikulum pondok pesantren klasik dengan pondok modern yang diadopsi dari Kweekschool.⁸¹ Gontor pun menjelma sebagai ponpes modern berkat implementasi kurikulum integratif antara ilmu agama dan ilmu umum dengan jumlah porsi pengajaran yang sama.⁸²

Selain revolusi pondok modern, Zarkasyi pernah menjabat sebagai kepala Kantor Agama Keresidenan Madiun, anggota Direktorat Pendidikan Agama Departemen Agama, ketua Persatuan Guru Islam Indonesia, dan anggota Dewan Perancang Nasional dalam kurun tahun 1951-1959. Kontribusi nyata Imam Zarkasyi dalam kancah nasional pada kesuksesan Departemen Agama mempertahankan pengelolaan madrasah tetap di bawah kendalinya sendiri setelah adanya wacana pemindahan ke

⁷⁸ Okfrida Hidayati, Anisa Fitri, and Eva Dewi, “Pembaharuan Pendidikan Pesantren menurut KH. Imam Zarkasyi dan Syekh Sulaiman Ar-Rasuli,” *Ainara Journal (Jurnal Penelitian dan PKM Bidang Ilmu Pendidikan)* 5, no. 3 (September 5, 2024): 297–307, <https://doi.org/10.54371/ainj.v5i3.544>.

⁷⁹ Mamluatul Hasanah, “KH. Ahmad Dahlan and KH. Imam Zarkasyi about Islamic Education,” *ATTAQWA: Jurnal Pendidikan Islam dan Anak Usia Dini* 3, no. 3 (November 2, 2024): 143–54, <https://doi.org/10.58355/attaqwa.v3i3.78>.

⁸⁰ Hidayati, Fitri, and Dewi, “Pembaharuan Pendidikan Pesantren menurut KH. Imam Zarkasyi dan Syekh Sulaiman Ar-Rasuli.”

⁸¹ Najwa Mu’minah, “Character Building Dalam Konsep Pendidikan Imam Zarkasyi Ditinjau dari Filsafat Moral Ibnu Miskawaih,” *Jurnal Filsafat* 25, no. 1 (August 14, 2016): 100, <https://doi.org/10.22146/jf.12616>.

⁸² Agung Ilham Prastowo, *Pembaruan Pendidikan Pesantren Dalam Perspektif K.H. Imam Zarkasyi* (Ponorogo: Prime Identity House, 2023).

Departemen Pendidikan Kebudayaan dan kesuksesan dalam program peningkatan mutu pendidikan madrasah dalam wujud penyetaraan ijazah lulusan, kemudahan untuk melanjutkan ke jenjang sekolah umum, integrasi kurikulum, dan pengakuan resmi madrasah dalam sistem pendidikan nasional.⁸³

Azyumardi Azra

Azyumardi Azra dikenal sebagai tokoh pembaharu pendidikan Islam dengan gagasan beliau tentang modernisasi dan demokratisasi pendidikan Islam serta dikenal sebagai reformis IAIN (Institut Agama Islam Negeri) bertransformasi menjadi UIN (Universitas Islam Negeri).⁸⁴ Beliau adalah salah satu tokoh pendidikan asal tanah Minang yang lahir pada 4 Maret 1955. Beliau mengenyam pendidikan dasar hingga tinggi di tanah kelahiran beliau sendiri yang puncaknya di PGAN (Pendidikan Guru Agama Negeri). Setelah itu, beliau melanjutkan pendidikan tinggi sarjana IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta hingga magister dan doktoral di Universitas Columbia, Amerika Serikat.⁸⁵ Masa hidup Azra banyak beliau manfaatkan untuk membuat kontribusi dalam pendidikan Islam lewat berbagai karya dalam bentuk ide dan pemikiran. Salah satu paradigma beliau terkait tujuan dari pendidikan Islam adalah terwujudnya manusia yang cakap pengetahuan dalam beragama dan merealisasikan ilmunya dalam pengamalan nyata alias untuk mencetak insan kamil.⁸⁶ Paradigma tujuan itu pun diejawantahkan ke dalam delapan butir pondasi pendidikan Islam yaitu, 1) iman dan takwa, 2) kemandirian, 3) kebangsaan, 4) keseimbangan

⁸³ Abudin Nata, *Tokoh-Tokoh Pembaruan Pendidikan Islam Di Indonesia* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005).

⁸⁴ Wahyuddin Noor, "Azyumardi Azra : Pembaruan Pemikiran dan Kelembagaan Pendidikan Islam di Indonesia," *Tarbawy : Jurnal Pendidikan Islam* 5, no. 1 (April 15, 2018): 19–28, <https://doi.org/10.32923/tarbawy.v5i1.827>.

⁸⁵ Malihatul Azizah and Fauzi Fauzi, "Pendidikan Karakter Dalam Pembaruan Pendidikan Islam (Studi Atas Pemikiran Azyumardi Azra)," *Edukasi Islami: Jurnal Pendidikan Islam* 11, no. 3 (October 31, 2022): 759–77, <https://doi.org/10.30868/ei.v11i03.2559>; Iswantir M, "Gagasan dan Pemikiran serta Praksis Pendidikan Islam di Indonesia," *JURNAL EDUCATIVE* 2, no. 2 (2017): 165–78, <https://doi.org/10.30983/educative.v2i2.471>.

⁸⁶ Siti Nurul Wachidah, "Konstruksi Pendidikan Islam di Era Global Menurut Azyumardi Azra," *CENDEKIA: Jurnal Ilmu Pengetahuan* 1, no. 3 (August 16, 2021): 177–86, <https://doi.org/10.51878/cendekia.v1i3.404>.

antara kepribadian dan kecerdasan, 5) pengembangan budaya, 6) kemampuan berpikir dan bertindak, 7) kemanusiaan, dan 8) keluarga.⁸⁷

Azra juga dikenal sebagai sosok modernisasi pendidikan Islam di Indonesia dengan kesuksesan beliau merevolusi IAIN menjadi UIN saat menjabat jabatan rektor UIN Syarif Hidayatullah. Pembaharuan IAIN menjadi UIN ini ditandai dengan pembukaan fakultas dan jurusan non keagamaan sehingga tidak ada lagi pembatas bagi para tamatan sekolah untuk bersekolah di PTKIN.⁸⁸ Azra juga mendorong revolusi sarana-prasarana pembelajaran, pendirian banyak pusat studi dan kerjasama, dan peningkatan kesejahteraan dosen dan karyawan di lingkungan PTKIN.⁸⁹

D. PENUTUP

Terwujudnya integrasi dan kombinasi yang matang antara tiga unsur penggerak Pendidikan yaitu kebijakan, lembaga pendidikan, dan para tokoh pendidikan Islam menjadi motor utama yang nyata dalam perkembangan pendidikan Islam yang urut, terstruktur, dan koheren. Kebijakan mendorong perubahan dan pemajuan lembaga pendidikan, lembaga menjadi objek implementasi dan transformasi, dan penyertaan pemikiran para tokoh sebagai rambu dan arah. Pada akhirnya, pembangunan pendidikan Islam di Indonesia merupakan manifestasi dari proses panjang dan sistematis yang diwarnai pelibatan unsur politik, kelembagaan, dan intelektual di belakangnya.

Berdasarkan hasil kajian ini, arah kebijakan dan regulasi pemerintah terkhusus untuk pendidikan Islam perlu terus untuk dijaga dan dimatangkan. Jaringan diskusi, kolaborasi, dan komunikasi yang baik antara pemerintah dengan institusi pendidikan sebagai pelaksana serta para tokoh pendidikan Islam menjadi kunci utama dalam menjaga konsistensi dan perbaikan mutu pendidikan Islam di tanah air. Sementara pada ranah lain, perlu untuk digalakkan berbagai penelitian dan kajian dalam model-model

⁸⁷ Sofi Ananda and Selamat Pohan, "Pemikiran Azyumardi Azra Tentang Pendidikan Islam Di Indonesia," *Berajah Journal* 5, no. 1 (2025): 59–72, <https://doi.org/10.47353/bj.v5i1.563>.

⁸⁸ Iswantir M, "Gagasan dan Pemikiran serta Praksis Pendidikan Islam di Indonesia."

⁸⁹ Noor, "Azyumardi Azra."

revolusi pendidikan Islam dengan pelibatan berbagai unsur seperti pemerintah, lembaga pendidikan, dan para cendekiawan, pengembangan model integrasi keilmuan, dan penelitian representatif terkait peranan dan ketokohan para figur pemikir bangsa dalam pendidikan Islam.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdulloh, Muhammad. "Pembaharuan Pemikiran Mahmud Yunus Tentang Pendidikan Islam Dan Relevansinya Dengan Pendidikan Modern." *AL MURABBI* 5, no. 2 (June 27, 2020): 22–33. <https://doi.org/10.35891/amb.v5i2.2109>.
- Abudin Nata. *Tokoh-Tokoh Pembaruan Pendidikan Islam Di Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005.
- Achmad Sudaryo. "Dinamika Pendidikan Islam di Indonesia." *Interdisiplin: Journal of Qualitative and Quantitative Research* 1, no. 1 (December 16, 2023): 1–9. <https://doi.org/10.61166/interdisiplin.v1i1.1>.
- Adibah, Ida Zahara. "Dinamika Lembaga Pendidikan Islam Di Indonesia Pada Masa Orde Baru (1966-1998)." *Jurnal Inspirasi* 14, no. 2 (2020): 110–26. <https://doi.org/10.61689/inspirasi.v4i2.194>.
- Afida, Ifa. "Historitas Lembaga Pendidikan Islam di Indonesia." *FALASIFA : Jurnal Studi Keislaman* 9, no. 1 (March 25, 2018): 17–34. <https://doi.org/10.36835/falasifa.v9i1.97>.
- Agung Ilham Prastowo. *Pembaruan Pendidikan Pesantren Dalam Perspektif K.H. Imam Zarkasyi*. Ponorogo: Prime Identity House, 2023.
- Aisyah, Siti. "Pendidikan Islam pada Masa Reformasi (1998-Sekarang)." *Journal of Islamic Education El Madani* 2, no. 1 (January 20, 2023): 47–56. <https://doi.org/10.55438/jiee.v2i1.39>.
- Akhiruddin, KM. "Lembaga Pendidikan Islam di Nusantara." *Jurnal Tarbiya* 1, no. 1 (2015): 195–219.
- Alam, Lukis. "Kontestasi Kebijakan Pendidikan Islam Di Era Orde Baru dan Reformasi." *Ruhama : Islamic Education Journal* 3, no. 2 (October 9, 2020): 59–79. <https://doi.org/10.31869/ruhama.v3i2.2223>.
- Ananda, Sofi, and Selamat Pohan. "Pemikiran Azyumardi Azra Tentang Pendidikan Islam Di Indonesia." *Berajah Journal* 5, no. 1 (2025): 59–72. <https://doi.org/10.47353/bj.v5i1.563>.
- Anjasari, Titi. "Kebijakan Pendidikan Islam di Era Orde Lama dan Orde Baru." *Jurnal Studi Islam dan Kemuhammadiyah (JASIKA)* 2, no. 2 (September 30, 2022): 141–55. <https://doi.org/10.18196/jasika.v2i2.34>.
- Asror, Moh, M. Yunus Abu Bakar, and Ah. Zakki Fuad. "Modernisme Pendidikan Islam dalam Pemikiran Mahmud Yunus: Analisis dan Relevansinya dalam Peningkatan Mutu Pendidikan Islam Indonesia Era Society 5.0." *Jurnal Pendidikan Agama Islam Al-Thariqah* 8, no. 1 (June 29, 2023): 35–52. [https://doi.org/10.25299/al-thariqah.2023.vol8\(1\).11693](https://doi.org/10.25299/al-thariqah.2023.vol8(1).11693).

- Azizah, Malihatul, and Fauzi Fauzi. "Pendidikan Karakter Dalam Pembaruan Pendidikan Islam (Studi Atas Pemikiran Azyumardi Azra)." *Edukasi Islami: Jurnal Pendidikan Islam* 11, no. 3 (October 31, 2022): 759–77. <https://doi.org/10.30868/ei.v11i03.2559>.
- Azzami, Muhammad, Sangkot Sirait, and Muqowim Muqowim. "Reintegration of Islamic Education: New Direction for the Transformation of Madrasah Education." *Al-Ishlah: Jurnal Pendidikan* 16, no. 4 (December 25, 2024): 5357–68. <https://doi.org/10.35445/alishlah.v16i4.5931>.
- Chairiyah, Yayah. "Sejarah Perkembangan Sistem Pendidikan Madrasah Sebagai Lembaga Pendidikan Islam." *Ma'alim: Jurnal Pendidikan Islam* 2, no. 1 (June 1, 2021). <https://doi.org/10.21154/maalim.v2i01.3129>.
- Depita, Teti. "Pemikiran Mahmud Yunus Tentang Pendidikan Islam." *Jurnal Tawadhu* 8, no. 1 (April 22, 2024): 41–56. <https://doi.org/10.52802/twd.v8i1.795>.
- Desmaniar, Rusli, Aqil Teguh Fathani, Novia Amirah Azmi, Muhammad Mughni, Imam Rasikh Islami, and Abdan Syukri. "Towards Sustainable Development of Islamic Higher Education: A Meta-Analysis of Challenges and Opportunities." *Millah: Journal of Religious Studies*, October 13, 2022, 741–70. <https://doi.org/10.20885/millah.vol21.iss3.art5>.
- DM Herman. "Sejarah Pesantren Di Indonesia." *Jurnal Al-Ta'dib* 6, no. 2 (2013): 145–58.
- Eva Tri Cahyanti. "Kebijakan Pendidikan Islam di Indonesia: Masa Kolonial Hingga Masa Reformasi." *Edukasia: Jurnal Pendidikan dan Pembelajaran* 2, no. 2 (August 11, 2021): 181–97. <https://doi.org/10.62775/edukasia.v2i2.47>.
- Haidar Putra Daulany. *Pendidikan Islam Di Indonesia: Historis Dan Eksistensinya*. Jakarta: Prenadamedia Grup, 2019.
- Haidar Putra Daulay. *Pendidikan Islam Dalam Sistem Pendidikan Nasional*. Jakarta: Kencana Prenadamedia Grup, 2004.
- . *Sejarah Pertumbuhan Dan Pembaruan Pendidikan Islam Di Indonesia*. Jakarta: Prenadamedia Grup, 2018.
- Hanipudin, Sarno. "Pendidikan Islam di Indonesia dari Masa ke Masa." *Matan : Journal of Islam and Muslim Society* 1, no. 1 (October 26, 2019): 39. <https://doi.org/10.20884/1.matan.2019.1.1.2037>.
- Hasan Asari. "Perkembangan Pendidikan Tinggi Islam Di Indonesia." In *Sejarah Pertumbuhan Dan Perkembangan Lembaga-Lembaga Pendidikan Islam Di Indonesia*, 167–88. Jakarta: Salemba Diniyah, 2017.
- Hasbullah. *Sejarah Pendidikan Islam Di Indonesia*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1999.
- Hasbullah, Hasbullah, and Arizal Eka Putra. "Pendidikan Islam Orde Reformasi (pendekatan Politik dan Kebijakan Pendidikan)." *Ta'lim* 4, no. 1 (February 18, 2022): 23–33. <https://doi.org/10.36269/tlm.v4i1.601>.
- Helmy, Muhammad Irfan, Ahmad Darajat Jumadil Kubro, and Muhamad Ali. "The Understanding of Islamic Moderation (Wasatiyyah al-Islam)

- and the Hadiths on Inter-Religious Relations in the Javanese Pesantrens.” *Indonesian Journal of Islam and Muslim Societies* 11, no. 2 (December 8, 2021): 377–401. <https://doi.org/10.18326/ijims.v11i2.351-376>.
- Hermawan, Toto, Fattah S. Santoso, Imroatun Imroatun, Diamah Fitriyah, and Bustomi Ibrohim. “How Santri Learn Entrepreneurship: A Case Study.” *Proceeding of Annual International Conference on Islamic Education and Language (AICIEL)*, December 17, 2025, 613–22.
- Hidayat, Rahmat, Khairun Nisa, M Zaini, Dewi Safitri, and Baiq Ida Astini. “Realita Pendidikan Islam di Indonesia Pasca Kemerdekaan: Perkembangan, Tantangan, dan Prospek Masa Depan.” *QuranicEdu: Journal of Islamic Education* 4, no. 2 (2024): 188–204.
- Hidayati, Okfrida, Anisa Fitri, and Eva Dewi. “Pembaharuan Pendidikan Pesantren menurut KH. Imam Zarkasyi dan Syekh Sulaiman Ar-Rasuli.” *Ainara Journal (Jurnal Penelitian dan PKM Bidang Ilmu Pendidikan)* 5, no. 3 (September 5, 2024): 297–307. <https://doi.org/10.54371/ainj.v5i3.544>.
- Hoddin, Muhammad Sholeh. “Dinamika Politik Pendidikan Islam di Indonesia; Studi Kebijakan Pendidikan Islam Pada Masa Pra-Kemerdekaan hingga Reformasi.” *Jurnal Ilmiah Iqra’* 14, no. 1 (October 30, 2020): 15–30. <https://doi.org/10.30984/jii.v14i1.1035>.
- Indra, Hasbi, Budi Handrianto, Wido Supraha, and Ibnu Rusydi. “Islamic Higher Education, Its Dynamics and Role From Time to Time.” *Tafkir: Interdisciplinary Journal of Islamic Education* 6, no. 2 (May 15, 2025): 402–19. <https://doi.org/10.31538/tijie.v6i2.1726>.
- Ismail, Moh. “Demokratisasi Pendidikan Islam dalam Pandangan KH. Abdul Wahid Hasyim.” *Jurnal Pendidikan Agama Islam (Journal of Islamic Education Studies)* 4, no. 2 (November 2, 2016): 315. <https://doi.org/10.15642/jpai.2016.4.2.315-336>.
- Iswantir M. “Gagasan dan Pemikiran serta Praksis Pendidikan Islam di Indonesia.” *Jurnal Educative* 2, no. 2 (2017): 165–78. <https://doi.org/10.30983/educative.v2i2.471>.
- Jafarul Musadad, Ahmad. “Dinamika Pendidikan Islam Pasca Kemerdekaan di Indonesia.” *Thaqaifiyyat : Jurnal Bahasa, Peradaban dan Informasi Islam* 20, no. 1 (April 6, 2021): 1–23. <https://doi.org/10.14421/thaq.2021.20101>.
- Khariyah, Yustifa Tariful Mujiana. “Peran K.H Abdul Wahid Hasyim dalam Pendidikan dan Pengaruhnya dalam Pendidikan Islam.” *Jurnal Studi Islam dan Kemuhammadiyah (JASIKA)* 2, no. 1 (April 13, 2022). <https://doi.org/10.18196/jasika.v2i1.17>.
- Khoirunnisaa Sholihah Luthfi Alya’. “Perkembangan Kurikulum Pendidikan Agama Islam di Indonesia.” *Risalah: Jurnal Pendidikan dan Studi Islam* 9, no. 4 (2023): 1678–89. https://doi.org/10.31943/jurnal_risalah.v9i4.666.
- Maghfuri, Amin. “Analisis Politik Dan Kebijakan Pendidikan Islam Pada Awal Orde Reformasi (1998-2004).” *Tadbir : Jurnal Manajemen Pendidikan Islam* 8, no. 1 (2020): 14–26.
- Mahmud Yunus. *Sejarah Pendidikan Islam Di Indonesia*. Jakarta: Mahmud Yunus Wadzuriyyah, 2008.

- Mamluatul Hasanah. "KH. Ahmad Dahlan and KH. Imam Zarkasyi about Islamic Education." *Attaqwa: Jurnal Pendidikan Islam dan Anak Usia Dini* 3, no. 3 (November 2, 2024): 143–54. <https://doi.org/10.58355/attaqwa.v3i3.78>.
- Manpan Drajat. "Sejarah Madrasah di Indonesia." *al-Afkar, Journal for Islamic Studies* 1, no. 1 (January 28, 2018): 196–206. <https://doi.org/10.5281/ZENODO.1161729>.
- Masyhudi, Fauza. "Pemikiran Mahmud Yunus Tentang Konsep Pendidikan Islam." *Jurnal Tarbiyah* 21, no. 1 (2014): 96–118.
- Mawardi, Amirah. "Perkembangan Kurikulum Pendidikan Agama Islam di Indonesia." *TARBAWI: Jurnal Pendidikan Agama Islam* 1, no. 1 (January 20, 2017): 29–36. <https://doi.org/10.26618/jtw.v1i1.350>.
- Mestika Zed. *Metode Penelitian Kepustakaan*. Jakarta: Yayasan Obor, 2004.
- Muhammad Basyrul Muvid. *Studi Lembaga Pendidikan Islam Di Indonesia Dari Era Klasik Hingga Era Kontemporer*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2022.
- Muktamar, Ahmad, Yusril Ihza Mahendra, and Andi Sermayana. "Analisis Perbandingan Efektivitas Penerapan Kurikulum 2013 dan Kurikulum Merdeka pada Mata Pelajaran Pendidikan Agama Islam." *JIIIC: Jurnal Intelek Insan Cendikia* 1, no. 2 (2024): 130–43.
- Mu'minah, Najwa. "Character Building Dalam Konsep Pendidikan Imam Zarkasyi Ditinjau dari Filsafat Moral Ibnu Miskawaih." *Jurnal Filsafat* 25, no. 1 (August 14, 2016): 100. <https://doi.org/10.22146/jf.12616>.
- Mumtaz, Nadhif Muhammad. "Kebijakan Pendidikan Islam Dari Masa Ke Masa." *Jurnal Pendidikan Tambusai* 6, no. 2 (2022): 16511–24.
- Musaropah, Umi. "Pendidikan Kebangsaan dalam Pesantren Perspektif Abdul Wahid Hasyim." *Ulumuddin : Jurnal Ilmu-ilmu Keislaman* 9, no. 1 (November 23, 2019): 1–22. <https://doi.org/10.47200/ulumuddin.v9i1.284>.
- Nasir, Muhammad. "Sejarah Lembaga Pendidikan Islam (madrasah) di Indonesia." *Jurnal Ilmiah Al Qalam* 11, no. 24 (2017): 1–12. <http://dx.doi.org/10.35931/aq.v0i0.15>.
- Nasrudin, Muhammad, Hilman Harun, Ahmad Salim, and Ahmad Dimyati. "Strategi Epistemologis Implementasi Pendidikan Holistik Pada Pondok Pesantren." *Ulumuddin : Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman* 11, no. 1 (June 2021): 69–84. <https://doi.org/10.47200/ulumuddin.v11i1.767>.
- Nina Herlina. *Metode Sejarah*. Bandung: Satya Historika, 2020.
- Nirmala, Zilfadlia. "Studi Kritis Tentang Kebijakan Pemerintahan Orde Lama, Orde Baru, dan Era Reformasi terhadap Pendidikan Islam." *Jurnal Religion: Jurnal Agama, Sosial, dan Budaya* 1, no. 6 (2023): 1404–23. <https://doi.org/10.55606/religion.v1i6.875>.
- Noor, Wahyuddin. "Azyumardi Azra: Pembaruan Pemikiran dan Kelembagaan Pendidikan Islam di Indonesia." *Tarbawy: Jurnal Pendidikan Islam* 5, no. 1 (April 15, 2018): 19–28. <https://doi.org/10.32923/tarbawy.v5i1.827>.
- Panut, Panut, Giyoto Giyoto, and Yusuf Rohmadi. "Implementasi Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 Tentang Pesantren Terhadap

- Pengelolaan Pondok Pesantren.” *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 7, no. 2 (July 5, 2021): 816–28. <https://doi.org/10.29040/jiei.v7i2.2671>.
- Priatna, Tedi. “Demography of Madrasah Diniyah Takmiliyah and Revitalizing the Institutional Function of Islamic Education.” *Journal of Southwest Jiaotong University* 55, no. 1 (2020). <https://jsju.org/index.php/journal/article/view/519>.
- Ramadhan, Sahrul and M. Ihsan. “Pemikiran Mahmud Yunus Tentang Pendidikan Agama Islam.” *Jurnal Pendidikan, Sains, Geologi, dan Geofisika (GeoScienceEd Journal)* 6, no. 2 (April 30, 2025): 959–64. <https://doi.org/10.29303/goescienceed.v6i2.1039>.
- Raya, Moch Khafidz Fuad. “Sejarah Orientasi Pendidikan Islam di Indonesia (dari Masa Kolonial hingga Orde Baru).” *Jurnal Pendidikan Islam* 8, no. 2 (2018): 228–42. <https://doi.org/10.38073%2Fjpi.v8i2.202>.
- Rozali, Yuli Asmi. “Penggunaan Analisis Konten Dan Analisis Tematik.” *Forum Ilmiah Volume* 19, no. 1 (2022): 68–76.
- Samudera, Sahara Adjie. “Undang-Undang Pesantren Sebagai Landasan Pembaruan Pondok Pesantren di Indonesia (Studi Kebijakan UU No. 18 Tahun 2019).” *Fahima* 2, no. 2 (July 6, 2023): 186–200. <https://doi.org/10.54622/fahima.v2i2.92>.
- Santoso, Fattah Setiawan, Cipto Sembodo, Subari, Muhammad Nur Kholis Al Amin, Salahuding Daman, and Abdul Hafidh Saemasae. “The Future Of Islamic Law Studies At Indonesia Islamic Higher Education.” *Proceeding of Annual International Conference on Islamic Education and Language (AICIEL)*, November 30, 2023, 622–28.
- Sari, Ana Kurnia, and Muhammad Sirozi. “Politik Pendidikan Islam Indonesia Masa Reformasi (1998-Sekarang).” *Tarbawy: Jurnal Pendidikan Islam* 10, no. 1 (April 30, 2023): 20–37. <https://doi.org/10.32923/tarbawy.v10i1.3449>.
- Sholikhah, Ana Rodhiyatus and Muqowim. “Pemikiran Pendidikan Menurut KH Abdul Wahid Hasyim.” *Cakrawala Jurnal Manajemen Pendidikan Islam dan studi sosial* 6, no. 1 (June 28, 2022): 44–54. <https://doi.org/10.33507/cakrawala.v6i1.350>.
- Siddiq, Ahmad. “Reforms on Islamic Education in Indonesia (A Case of Pesantren, Madrasah, and Islamic University).” *Shibghoh: Prosiding Ilmu Kependidikan UNIDA Gontor* 1 (May 5, 2023): 67–78.
- Sofyan Rofi. *Sejarah Pendidikan Islam Di Indonesia*. Sleman: Deepublish, 2020.
- Sri Nilawati, Hifza, and Andi Achruh. “Pendidikan Islam di Indonesia Pasca Kemerdekaan.” *Pijar: Jurnal Pendidikan dan Pengajaran* 2, no. 1 (December 31, 2023): 108–15. <https://doi.org/10.58540/pijar.v2i1.492>.
- Suyadi, Zalik Nuryana, Sutrisno, and Baidi. “Academic Reform and Sustainability of Islamic Higher Education in Indonesia.” *International Journal of Educational Development* 89 (March 1, 2022): 102534. <https://doi.org/10.1016/j.ijedudev.2021.102534>.
- Syahrman, Agung, and Agus Mulyana. “Peranan Kh. Abdul Wahid Hasyim Dalam Pemerintahan Indonesia Tahun (1945-1953).” *Factum: Jurnal*

- Sejarah dan Pendidikan Sejarah* 8, no. 1 (September 23, 2019): 15–32. <https://doi.org/10.17509/factum.v8i1.20113>.
- Syeh Hawib Hamzah. “Pemikiran Mahmud Yunus Dalam Pembaruan Pendidikan Islam Di Indonesia.” *Dinamika Ilmu* 14, no. 1 (2014): 123–47.
- Universitas Islam Indonesia. *Setengah Abad UII*. Yogyakarta: UII Press, 2004.
- Usman DP and Syukeri Gazali. “Pendidikan Islam Dalam Perspektif Metode Penelitian Sejarah.” *Darul Ulum: Jurnal Ilmiah Keagamaan, Pendidikan dan Kemasyarakatan* 13, no. 1 (June 30, 2022): 51–74. <https://doi.org/10.62815/darululum.v13i1.78>.
- Usman, Muhammad, and Anton Widyanto. “Undang-Undang Pesantren: Meneropong Arah Kebijakan Pendidikan Pesantren di Indonesia.” *Ar-Raniry, International Journal of Islamic Studies* 8, no. 1 (2021): 57–70. <https://doi.org/10.22373/jar.v8i1.10991>.
- Wachidah, Siti Nurul. “Konstruksi Pendidikan Islam di Era Global Menurut Azyumardi Azra.” *Cendekia: Jurnal Ilmu Pengetahuan* 1, no. 3 (August 16, 2021): 177–86. <https://doi.org/10.51878/cendekia.v1i3.404>.
- Yahdi, Muhammad. “Sejarah Pertumbuhan dan Perkembangan Pendidikan Islam di Indonesia.” *Jurnal Pendidikan Kreatif* 4, no. 1 (June 30, 2023): 64–72. <https://doi.org/10.24252/jpk.v4i1.39183>.
- Yuliani and Edy Purwanto. “Pendidikan Islam Di Indonesia Setelah Merdeka.” *Adiba: Journal of Education* 2, no. 1 (2022): 88–96.
- Zidah, Afiani Arofatul, Krisna Ridha Pratama, and Yohanes Purwanto. “Sejarah Perkembangan Pendidikan Islam Era Reformasi di Indonesia.” *Historia: Jurnal Program Studi Pendidikan Sejarah* 9, no. 1 (February 28, 2021): 97–106. <https://doi.org/10.24127/hj.v9i1.2528>.
- Zulkifli and Muhammad. “Perkembangan Kurikulum Pendidikan Agama Islam Di Indonesia (Telaah Kurikulum PAI Pra Kemerdekaan hingga Kurikulum Merdeka).” *jurnal PAI: Jurnal Kajian Pendidikan Agama Islam* 2, no. 2 (December 31, 2023): 142–61. <https://doi.org/10.33507/pai.v2i2.1146>.